

**PERANAN BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH  
SUMATERA UTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN BAHAYA FLU BURUNG  
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 7 TAHUN  
2006 DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI  
NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas  
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

**OLEH**

**ROMI GILFANI DAULAY**

NPM : 01 840 0063

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 0 6**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**



**PENULIS:**

**NAMA : ROMI GILFANI DAULAY**

**NPM : 01.840.0063**

**BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH SUMATERA UTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BAHAYA FLU BURUNG MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.7 TAHUN 2006 DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.**

**PENGUJI:**

**T.TANGAN**

**KETUA : ARIF,SH.MH**

**SEKRETARIS : AZIZAH,SH**

**PEMBIMBING I : ZAMZAMI,SH.MH.**

**PEMBIMBING II : HJ.RAHMANIAR,SH.M.HUM**

**DISETUJUI OLEH**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM – UMA**

**KETUA BIDANG  
HKM.ADMINISTRASI NEGARA FH-UMA**

**SYAFARUDDIN,SH.MHUM**

**ZAMZAMI,SH.MH.**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Tanggal Lulus:.....**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENULIS :-**

**NAMA : ROMI GILFANI DAULAY**  
**NPM : 01 840 0063**  
**BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERANAN BIRO BINA SOSIAL  
SEKRETARIAT DAERAH SUMATERA  
UTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN BAHAYA FLU  
BURUNG MENURUT PERATURAN  
PRESIDEN NO. 7 TAHUN 2006 DITINJAU  
DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**II. DOSEN PEMBIMBING :**

**1. N A M A : ZAMZAMI, SH.MH.**  
**JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I**  
**TGL. PENGESAHAN :**  
**TANDA TANGAN : .....**

**2. N A M A : HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM.**  
**JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II**  
**TGL. PENGESAHAN :**  
**TANDA TANGAN : .....**

**DISETUJUI OLEH  
KETUA BIDANG  
HKM. ADMINISTRASI NEGARA FH-UMA**

**(ZAMZAMI, SH, M.H.)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

## ABSTRAKSI

### PERANAN BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH SUMATERA UTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA FLU BURUNG MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 7 TAHUN 2006 DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

O L E H

ROMI GILFANI DAULAY

NPM : 01 840 0063

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dewasa ini pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia menghadapi hambatan berupa semakin meluas epidemik penyakit flu burung (*avian influenza*) yang tidak saja terjadi di Pulau Jawa tetapi sudah menyeberang ke Pulau Sumatera khususnya yang terjadi dewasa ini sebagaimana terdapat di Tanah Karo tepatnya pada daerah Kabanjahe.

Salah dimensi yang sangat tidak produktif dan mengakibatkan semakin meluasnya bahaya virus flu burung ini adalah lambannya kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintahan (instansi terkait) dalam mengambil kebijaksanaan perihal penanggulangan bahaya virus flu burung itu sendiri.

Disebabkan banyaknya organisasi pemerintahan yang berkecimpung di bidang kesehatan dari mulai tingkat pusat sampai ke daerah, maka perwujudan yang sangat potensial dalam menghadapi virus flu burung ini adalah koordinasi antar instansi pemerintahan tersebut.

Dari pengertian judul di atas maka dapat dibuat penegasan bahwa pembahasan skripsi adalah sekitar tentang efektivitas dari fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan serta pencegahan tentang bahaya flu burung dan pembahasan tersebut akan dikaitkan dengan Hukum Administrasi Negara.

Masalah penelitian ini sebagai berikut :

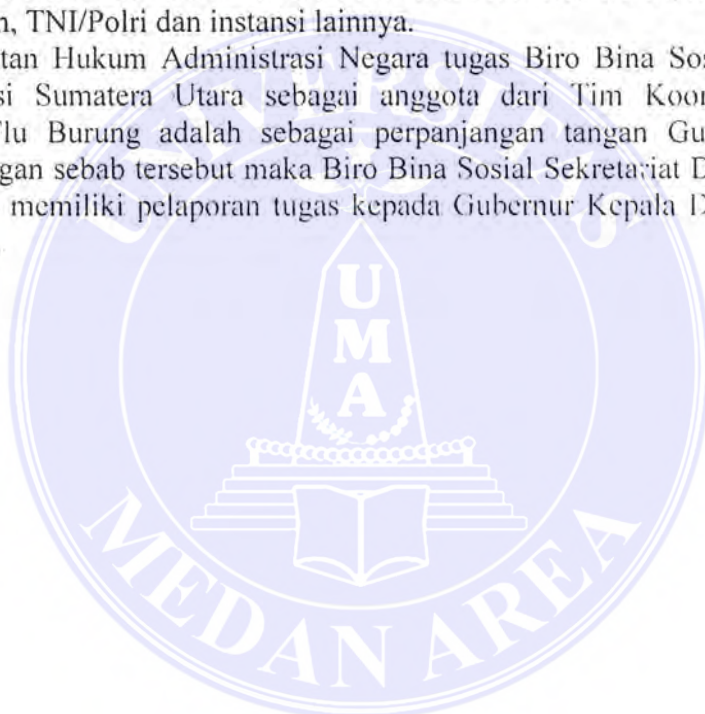
1. Bagaimana upaya instansi terkait khususnya Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan penyebaran flu burung ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit bahaya flu burung?

Dari hasil pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan maka diketahui upaya instansi terkait khususnya Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan penyebaran flu burung adalah berupa penyuluhan dengan menerbitkan brosur dan

penyuluhan secara langsung tentang bagaimana penularan virus flu burung serta gejala-gejala pada manusia yang terjangkit flu burung. Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit bahaya flu burung adalah kekurangan sinkronan dari hal-hal yang dikoordinasikan sehingga sering terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan pelaksanaan pembebanan tanggung jawab secara sepihak.

Koordinasi yang dilakukan dalam penanganan virus flu burung adalah lintas sektoral antar Biro dan antar dinas di bawah naungan Komite Nasional Pengendalian Flu Burung untuk tingkat pusat dan Komite Daerah untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi-instansi yang terlibat dalam koordinasi sektoral tersebut adalah Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, TNI/Polri dan instansi lainnya.

Keterkaitan Hukum Administrasi Negara tugas Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai anggota dari Tim Koordinasi Daerah Pengendalian Flu Burung adalah sebagai perpanjangan tangan Gubernur Kepala Daerah dan dengan sebab tersebut maka Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki pelaporan tugas kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.



## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KOORDINASI DAN FLU BURUNG.....	12
A. Landasan Hukum Sistem Kesehatan Nasional.....	12
B. Pengertian Koordinasi.....	15
C. Fungsi Koordinasi.....	18
D. Pengertian Efidemi Flu Burung.....	20
E. Hal-Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Flu Burung.....	28
BAB III. BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.....	37

A. Tinjauan Umum Tentang Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	37
B. Tugas, Fungsi dan Kedudukan .....	38
C. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas .....	39
D. Kedudukan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Menghadapi Efidemi Flu Burung.....	53
<b>BAB IV. PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA EFIDEMI FLU BURUNG. ....</b>	<b>56</b>
A. Pelaksanaan Koordinasi Antara Instansi Dalam Penanggulangan dan Peningkatan Pengetahuan Bahaya Terhadap Efidemi Flu Burung.....	56
B. Instansi-Instansi Terkait Dalam Koordinasi.....	59
C. Efektivitas Koordinasi Dalam Penanggulangan Efidemi Flu Burung.....	60
D. Kendala dan Hambatan. ....	66
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

Pencapaian tujuan suatu organisasi sangat tergantung kepada ada tidaknya kerja sama antara berbagai pihak, dan dalam lingkungan pemerintah kegiatan itu tidak saja melingkupi secara intern tetapi juga berlaku secara ekstern. Artinya dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada suatu organisasi pemerintahan maka dibutuhkan kerjasama secara lintas sektoral sehingga efektivitas dari tugas suatu organisasi tersebut dapat mencapai hajat sebagaimana dimaksudkan.

Kebutuhan akan bantuan orang lain ini menimbulkan suatu kebijaksanaan yang harus diambil oleh pimpinan organisasi pemerintahan tersebut. Kebijakan ini menyangkut masalah sinkronisasi tugas yang dibebankan kepada organisasi itu sendiri agar dalam pelaksanaannya tidak memiliki peran ganda dengan instansi lainnya, maka yang dibutuhkan tersebut adalah dalam bentuk koordinasi. Dengan koordinasi maka efektivitas tugas suatu organisasi pemerintahan tidak akan tumpang tindih, karena masing-masing lembaga tersebut mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Di lain sisi Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, baik dalam arti material maupun spritual.



Sejalan dengan itu maka salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang kesehatan. Sebab pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekaligus dalam rangka usaha pembinaan, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dimaksud mencakup semua energi keterampilan bakat dan pengetahuan manusia yang menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Salah satu konsekwensi dalam pembangunan dan pendekatan sumber daya manusia dalam proses pembangunan nasional adalah pengembangan sumber daya manusia itu sendiri.

Dewasa ini pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia menghadapi hambatan berupa semakin meluas efidemi penyakit flu burung (*avian influenza*) yang tidak saja terjadi di Pulau Jawa tetapi sudah menyeberang ke Pulau Sumatera khususnya yang terjadi dewasa ini sebagaimana terdapat di Tanah Karo tepatnya pada daerah Kabanjahe.

Salah dimensi yang sangat tidak produktif dan mengakibatkan semakin meluasnya bahaya virus flu burung ini adalah lambannya kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintahan (instansi terkait) dalam mengambil kebijaksanaan perihal penanggulangan bahaya virus flu burung itu sendiri.

Disebabkan banyaknya organisasi pemerintahan yang berkecimpung di bidang kesehatan dari mulai tingkat pusat sampai ke daerah, maka perwujudan yang sangat potensial dalam menghadapi virus flu burung ini adalah koordinasi antar

instansi pemerintahan tersebut.

Dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, maka pada setiap daerah dibentuk Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota pengendalian Flu Burung.

Untuk daerah Provinsi Sumatera Utara maka salah satu anggota komite tersebut adalah Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selaku salah satu biro yang bertugas memperbantuan dan memberikan informasi kebijaksanaan sosial kepada Gubernur maka keberadaan biro ini sangat urgensi dalam menelurkan kebijaksanaan menghadapi pandemi flu burung, khususnya dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan instansi-instansi lainnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan pembahasan tentang pelaksanaan administrasi pelayanan kesehatan dengan judul : **Fungsi Koordinasi Di Lingkungan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Sumatera Utara Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Flu Burung Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara.**

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum diuraikan pembahasan skripsi ini maka terlebih dahulu diberikan pengertian dan penegasan judul. Adapun makna judul yang diajukan secara

etimologi (kata perkata) adalah sebagai berikut :

- Fungsi berarti manfaat, guna, faedah.<sup>1</sup>
- Koordinasi adalah pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok ke arah pencapaian maksud dan tujuan kelompok.<sup>2</sup>
- Di Lingkungan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara diartikan sebagai suatu ruang lingkup kajian yaitu pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan artinya ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan atas sesuatu peristiwa agar tidak menjadi meluas.
- Terhadap Bahaya Flu Burung artinya ada suatu risiko yang dihadapi oleh masyarakat tentang berjangkitnya bahaya penyakit flu burung.
- Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara artinya pembahasan ini akan diarahkan kepada kajian Hukum Administrasi Negara sebagai latar belakang disiplin ilmu yang dipilih penulis.
- Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur :
  - a. Aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai instansi politik (kenegaraan).
  - b. Administrasi negara sebagai fungsi melayani atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan.
  - c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Indrawan WS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2002, hal. 163.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 116.

<sup>3</sup> Prajudi Atmosoedirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 39.

Dari pengertian judul di atas maka dapat dibuat penegasan bahwa pembahasan skripsi adalah sekitar tentang efektivitas dari fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan serta pencegahan tentang bahaya flu burung dan pembahasan tersebut akan dikaitkan dengan Hukum Administrasi Negara.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Ada beberapa hal yang menjadikan latar belakang penelitian ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji dalam bentuk tulisan ilmiah, yaitu :

1. Koordinasi pada dasarnya memberikan akibat kepada pembagian tugas sehingga masing-masing instansi yang melakukan koordinasi memiliki fungsi dan tanggungjawab secara sendiri. Dalam kajian ini penulis ingin mengetahui apakah tugas yang dibebankan kepada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam hal penanggulangan efedemi penyakit flu burung.
2. Efektivitas peran Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam penanggulangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang bahaya flu burung tentunya menghadapi kendala dan hambatan, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah yang menjadi kendala dan hambatan tersebut.

3. Koordinasi dalam hal penanggulangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahaya flu burung juga melibatkan instansi terkait, maka dalam kajian ini penulis ingin mengetahui dengan lembaga mana sajakah koordinasi penanggulangan bahaya flu burung tersebut dilakukan.

### C. Permasalahan

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi, adalah : “Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu soal-soal yang telah diketahui sebagian, sedangkan yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan”.<sup>4</sup>

Dalam suatu penelitian pembatasan masalah sangat penting artinya. Hal ini disebabkan agar masalah yang akan diteliti mempunyai batas yang jelas. Isi uraian tidak menyimpang, dan kesimpulan yang akan diambil sebagai hasil penelitian tidak mengambang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Sesuai dengan uraian di atas maka penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya instansi terkait khususnya Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan penyebaran flu burung ?

---

<sup>4</sup> RA, Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003, hal. 1.

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit bahaya flu burung?

#### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan.

Kartini Kartono mengatakan tentang hipotesis itu adalah “ Hipotesa masih berisikan jawaban bersifat sementara dari suatu kegiatan penelitian, kebenarannya harus diutarakan dari suatu kegiatan melalui riset dan hipotesis itu akan diterima jika faktanya benar”.<sup>5</sup>

Adapun hipotesa yang diberikan atas permasalahan yang diajukan adalah :

1. Upaya instansi terkait khususnya Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan penyebaran flu burung adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang flu burung sebagai suatu epedimi dan tata cara penanganan awal jika ditemukan ada gejala-gejala penyakit flu burung di tengah-tengah masyarakat.
2. Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan dan pence-

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 70.

gahan penyakit bahaya flu burung, adalah kurangnya kerjasama masyarakat dan tingkat kepedulian yang rendah terhadap pemilik unggas untuk meningkatkan pola berternak yang sehat.

### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan pembahasan ini adalah :

1. Dengan dipilihnya judul ini kita akan melihat secara langsung bagaimana Hukum administrasi negara, khususnya pelaksanaan fungsi koordinasi dalam hal penanggulangan bahaya flu burung.
2. Melalui pembahasan dalam skripsi ini diharapkan akan bisa memberikan masukan kepada masyarakat luas tentang bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam menghadap bahaya flu burung.
3. Melalui pembahasan ini juga penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan area.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

### 1. Library research (Penelitian Kepustakaan)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

### 2. Field research (Penelitian Lapangan)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung juga di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, baik itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang tata cara kerja kantor tersebut maupun mengadakan wawancara kepada pegawai-pegawai yang berwenang memberikan informasi.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.



## BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KOORDINASI DAN FLU BURUNG

Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang : Landasan Hukum Sistem Kesehatan Nasional, Pengertian Koordinasi, Fungsi Koordinasi, Pengertian Efidemi Flu Burung, Hal-Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Flu Burung.

## BAB III. BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Tinjauan Umum Tentang Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tugas, Fungsi dan Kedudukan, Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas, serta Kedudukan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Menghadapi Efidemi Flu Burung.

## BAB IV. PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA EFIDEMI FLU BURUNG.

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pelaksanaan Koordinasi Antara Instansi Dalam Penanggulangan dan Peningkatan Pengetahuan Bahaya Terhadap Efidemi Flu Burung, Instansi-Instansi Terkait Dalam Koordinasi, Efektivitas Koordinasi Dalam Penanggulangan Efidemi Flu Burung, Kendala dan Hambatan.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KOORDINASI DAN FLU BURUNG

#### A. Landasan Hukum Sistem Kesehatan Nasional

Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakanlah program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya potensi Bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan Sistem Kesehatan Nasional yang tangguh. Di Indonesia, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) telah ditetapkan pada tahun 1982.<sup>6</sup> SKN tersebut telah berperan besar sebagai acuan dalam penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

---

<sup>6</sup>Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta, 2004, hal. 2.

bidang kesehatan, penyusunan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dan juga sebagai acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman, dan arah pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Memasuki milenium ketiga, Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang mendasar baik eksternal maupun internal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan nasional termasuk pembangunan kesehatan.

Dalam konteks eksternal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi adalah berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi-informasi yang mengarah pada terbentuknya dunia tanpa batas. Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya persaingan bebas, mengharuskan setiap komponen bangsa meningkatkan daya saing. Sejalan dengan itu demokratisasi, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan hidup telah menjadi tuntutan dunia yang semakin mendesak. Keterikatan Indonesia dengan berbagai komitmen internasional seperti Millennium Development Goals, Sustainable Development Principles, World Fit for Children dan aganeda-agenda internasional lainnya di bidang kesehatan, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Dalam konteks internal, perubahan dan tantangan strategis yang terjadi adalah munculnya krisis moneter pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi meliputi krisis politik, ekonomi, sosial, budaya, dan

keamanan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Berbagai kondisi tersebut berdampak luas terhadap perikehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, diantaranya meningkatnya pengangguran dan jumlah penduduk miskin, menurunnya derajat kesehatan penduduk yang pada gilirannya berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia Indonesia.

Tuntutan yang genjar terhadap perlu diselenggarakannya tata pemerintahan yang baik khususnya yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tantangan yang mengemuka yang harus mendapat perhatian. Makin mengemukanya peranan masyarakat madani, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta kalangan swasta dalam menentukan kebijakan publik perlu pula mendapat tanggapan yang seksama.

Pengakuan akan pentingnya peranan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang di Indonesia diwujudkan melalui diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang juga diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, adalah perubahan dan tantangan strategis internal yang perlu diperhatikan. Dilakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2002, yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, juga merupakan perubahan dan tantangan strategis internal lainnya.

Menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada, Sidang MPR Tahun 1998 telah menetapkan Ketetapan MPRI RI No. X Tahun 1998 tentang Pookok-Pokok Reformasi pembangunan. Ketetapan MPR ini mengamanatkan perlu dilakukannya pembaharuan melalui reformasi total kebijakan pembangunan dalam segala bidang. Untuk bidang kesehatan pembaharuan tersebut telah ditetapkan Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, sebagai strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan, yaitu Indonesia Sehat 2010.

Selanjutnya berdasarkan visi tersebut, telah berhasil ditetapkan pula dasar-dasar, misi, strategis, dan paradigma pembangunan kesehatan baru yaitu Paradigma Sehat yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi merupakan salah satu strategi yang ditetapkan untuk mencapai visi Indonesia sehat 2010 dan misi pembangunan kesehatan.

## **B. Pengertian Koordinasi**

Di dalam suatu organisasi, koordinasi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikembangkan, dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya penulis berikan batasan tentang koordinasi.

Menurut James Mooney sebagaimana dikutip oleh Sondang P. Siagian :  
“Koordinasi yaitu sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur, dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama”.<sup>7</sup>

Dari pendapat di atas, bahwa di dalam suatu usaha di dalam organisasi/lembaga untuk mencapai tujuan yang ditentukan, maka koordinasi adalah merupakan suatu cara pelaksanaannya.

Oleh karena itu agar tujuan dari pada organisasi/lembaga itu ingin berhasil dengan baik, tentunya satuan satuan kerja yang ada di dalam organisasi tersebut harus senantiasa berhubungan dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, dalam artian tanpa bekerja dengan sendiri – sendiri.

Menurut Sondang P. Siagian menyatakan :

Dalam kehidupan organisasi bahwa para anggota organisasi tidak dapat dan mungkin terisolasi, baik dari rekan-rekan sekerjanya ataupun dari lingkungan, tujuan yang hendak dicapai, strategis yang harus dijelaskan, keputusan yang dilaksanakan.

Kesemuanya itu memerlukan hubungan, baik antara lain individu maupun antara kesatuan kerja dimaksud, bahwa komunikasi merupakan bagian integral pada seluruh proses administrasi dan management.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa koordinasi dalam hubungan kerja sangat diharapkan, karena tanpa koordinasi yang baik dari seorang pemimpin, maka pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab dapat terbengkalai dan bahkan dapat berakibat buruk bagian negara dan baik antara pimpinan dan bawahan.

---

<sup>7</sup>Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2000, hal. 116.

<sup>8</sup>Ibid, hal. 117.

yang mana kedua-duanya saling kait mengkait dan isi mengisi. Bila tidak terjadi komunikasi yang baik, maka sulit untuk mengembangkan para anggota organisasi dan bahkan tujuan dari organisasi mengalami kegagalan. Dengan demikian, maka sulit untuk mengembangkan para anggota organisasi dan bahkan tujuan dari organisasi mengalami kegagalan.

Koordinasi juga bukan saja mencakup kepada satu segi tetapi juga beberapa segi dan proses antara lain segi perencanaan, penyusunan, dan lain-lain. Koordinasi adalah suatu fungsi manajemen, di samping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan pekerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain, bahwa koordinasi adalah fungsi organisasi unik karena koordinasi juga mencakup seperti : perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, pengawasan dan sebagainya.

Dengan adanya proses komunikasi ini, merupakan usaha penghidupan mekanisme kerja dalam berbagai komponen organisasi, sehingga terjaminnya prosedut pelaksanaan kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan semaksimal mungkin, serta menghindari sekecil-kecilnya mungkin pertikaian dan berusaha membina suasana aman .

Koordinasi dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan, maka pembagian tugas, wewenang serta tanggung-jawab dapat dipertahankan dengan baik. Hal ini merupakan bagian langsung dari pada seorang pimpinan, dan sekaligus telah melahirkan jaringan hubungan kerja, dan sekaligus telah melahikan jaringan



hubungan kerja, sehingga dalam hal ini seorang pemimpin dalam mengambil tindakan tidak hanya sendirian bekerja, tetapi terlebih dahulu di bawah kesatuan forum yang melibatkan para anggota, sehingga bentuk tersebut dapat diterima.

Tipe koordinasi ini terbagi menjadi dua yaitu disebut dengan vertikal coordination dan horizontal coordination yakni, koordinasi dalam suatu level organisasi setingkat ini merupakan konsep umum dari koordinasi.

Koordinasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Koordinasi Vertikal.

Koordinasi vertikal adalah tindakan atau kegiatan penyatu paduan dan pengarahan yang dijalankan oleh atasan langsung kepada kegiatan-kegiatan atau unit dalam kesatuan kerja, yang ada di bawah wewenang dan tanggung-jawab.

2. Koordinasi Horizontal.

Koordinasi horizontal adalah suatu tindakan yang dijalankan diantara unit-unit atau kesatuan kerja yang menduduki jenjang hirarki atau tingkat manajemen yang sama.

### C. Fungsi Koordinasi

Koordinasi berhubungan dengan tugas menyatupadukan kegiatan-kegiatan guna menjamin suksesnya pencapaian tujuan.<sup>9</sup> Beberapa manajer berpendapat bahwa

---

<sup>9</sup>Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 34.

Koordinasi merupakan satu-satunya kata yang paling tepat untuk menentukan jumlah keseluruhan hasil kerja mereka. Penganjur tertentu menyamakan sebutan koordinator sebagai suatu istilah yang lebih tepat ketimbang manajer. Penganjur demikian menyadari bahwa mengkoordinasikan berarti hampir sama dengan menjalankan manajemen.

Sesungguhnya dalam tiap kelompok koordinasi memungkinkan hasil pekerjaan secara keseluruhan yang lebih besar ketimbang jumlah hasil kerja perseorangan. Misalnya, jumlah hasil pekerjaan Bagian X yang terdiri atas 10 orang pegawai yang kegiatannya dikoordinasikan dengan baik adalah jauh lebih besar ketimbang hasil pekerjaan 10 orang pegawai yang bekerja secara perseorangan. Koordinasilah yang mengakibatkan adanya perbedaan.

Koordinasi berhubungan dengan keefektifan organisasi dan unit-unitnya. Lawrence dan Lorsch menemukan bahwa perbedaan dalam koordinasi yang dicapai di antara unit-unit enam perusahaan plastik berhubungan dengan perbedaan dalam pelaksanaan pekerjaan organisasi. Perusahaan plastik yang mempunyai koordinasi yang lebih besar di antara unit-unit juga mengalami perubahan yang lebih besar dalam laba, penjualan, volume, dan pengembangan produk baru ketimbang perusahaan-perusahaan yang mempunyai koordinasi kecil. Koordinasi yang efektif dengan unit-unit lain merupakan suatu faktor penunjang yang penting terhadap suksesnya keseluruhan bagian.

#### D. Pengertian Efidemi Flu Burung

Penyakit influenza unggas (*avian influenza*), atau lebih dikenal sebagai “wabah flu burung”, pertama kali dilaporkan pada tahun 1878 sebagai wabah yang menjangkiti ayam dan burung di Italia tepatnya di Perroncito tahun 1878, yang disebut juga sebagai “Penyakit Lombardia” mengikuti nama sebuah daerah lembah di hulu sungai Po.<sup>10</sup>

Flu Burung (Avian Influenza ) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Influenza strain type A ( H5N1 ). Penyakit ini menular dari burung (unggas) ke burung, dapat juga menular dari burung ke manusia. Sedangkan penularan dari manusia ke manusia sampai saat ini belum ditemukan. Masa inkubasi selama 1 – 3 hari.<sup>11</sup>

Meskipun di tahun 1901 Centanini dan Savonucci berhasil mengidentifikasi organisme mikro yang menjadi penyebab penyakit tersebut, baru di tahun 1955 Schafer dapat menunjukkan ciri-ciri organisme itu sebagai virus influenza A. Dalam penjamu alami yang menjadi *reservoir* virus flu burung, yaitu burung-burung liar, infeksi yang terjadi biasanya berlangsung tanpa gejala (asimtomatik) karena virus influenza A itu dari jenis yang berpatogenisitas rendah dan hidup bersama secara seimbang dengan penjamu-penjamu tersebut.

<sup>10</sup>Kartono Muhammad, *Flu Burung*, Adafed From [www.influenzaReport.com](http://www.influenzaReport.com) by Sebastian Kamps, Christian Hofmann, and Wolfgang Preiser, hal. 1.

<sup>11</sup>Suku Dinas Pelayanan Kesehatan, Kotamadya Jakarta Utara, *Gejala dan Strategi Flu Burung*, 22/09/2005, 11:01:25.

Ketika turunan (*strain*) virus influenza unggas berpatogenisitas rendah (*Low Pathogenic Avian Influenza Virus*, LPAIV) ditularkan dari unggas “reservoir” ke ternak unggas yang rentan, seperti ayam dan kalkun (sebuah pijakan untuk penularan lintas spesies!), pada umumnya hewan-hewan itu hanya menunjukkan gejala-gejala yang ringan. Tetapi ketika spesies unggas tersebut menjadi sebab dari terjadinya beberapa siklus penularan, turunan (*strain*) virus tersebut dapat mengalami serangkaian mutasi yang beradaptasi dengan penjamunya yang baru.

Virus influenza A sub tipe H5 dan H7 bukan saja mengalami fase adaptasi dengan penjamu tetapi dapat pula berubah secara meloncat melalui mutasi insersi menjadi bentuk yang sangat patogen (*Highly Pathogenic Avian Influenza Virus*, HPAIV), yang mampu menimbulkan penyakit sistemik yang ganas dan mematikan secara cepat. Virus jenis HPAI tersebut dapat muncul secara tidak terduga dan sebagai tipe yang sama sekali baru (*de novo*) dalam unggas yang terkena infeksi oleh progenitor LPAI dari jenis sub tipe H5 dan H7.

Infeksi oleh virus HPAI pada unggas ditandai dengan gejala yang mendadak, berat dan berlangsung singkat, dengan mortalitas mendekati 100% pada spesies yang rentan. Akibat kerugian ekonomis yang sangat besar terhadap industri ternak unggas, HPAI mendapat perhatian yang sangat besar di kalangan kedokteran hewan dunia dan segera diberlakukan sebagai penyakit yang wajib segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Karena potensinya untuk dapat menurunkan HPAIV, penyakit LPAI dari sub tipe H5 dan H7 juga dikenakan wajib dilaporkan. Sebelum

tahun 1997, HPAI merupakan penyakit yang sangat jarang terjadi, dengan hanya ada 24 kejadian primer yang dicatat di seluruh dunia sejak tahun 1950-an.

Tetapi akhir-akhir ini influenza unggas memperoleh perhatian dunia ketika ditemukan ada *strain* (turunan) dari subtipe H5N1 yang sangat patogen, yang mungkin sudah muncul di China Selatan sebelum tahun 1997, menyerang ternak unggas di seluruh Asia Tenggara dan secara tidak terduga melintasi batas antar kelas ketika terjadi penularan dari burung ke mamalia (kucing, babi, manusia). Meskipun bukan merupakan kejadian pertama sejumlah kasus infeksi pada manusia akhir-akhir ini, yang ditandai dengan gejala parah dan menimbulkan kematian telah menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya pandemi infeksi virus *strain* H5N1. Ada sederetan bukti yang menunjukkan bahwa virus H5N1 telah mengalami peningkatan potensi patogenik pada beberapa spesies mamalia. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hal ini telah menimbulkan kekhawatiran umum di seluruh dunia.

Virus penyebab flu burung adalah Virus influenza adalah partikel berselubung berbentuk bundar atau bulat panjang, merupakan genome RNA rangkaian tunggal dengan jumlah lipatan tersegmentasi sampai mencapai delapan lipatan, dan berpolaritas negatif. Virus influenza merupakan nama generik dalam keluarga *Orthomyxoviridae* dan diklasifikasikan dalam tipe A, B atau C berdasarkan perbedaan sifat antigenik dari *nucleoprotein* dan matrix proteinnya. Virus influenza unggas (*Avian Influenza Viruses*, AIV) termasuk tipe A. Telaahan yang sangat bagus

mengenai struktur dan pola replikasi virus-virus influenza sudah dipublikasikan baru-baru ini.

Determinan antigenik utama dari virus influenza A dan B adalah glikoprotein transmembran hemagglutinin (H atau HA) dan neuroaminidase (N atau NA), yang mampu memicu terjadinya respons imun dan respons yang spesifik terhadap subtipe virus. Respons ini sepenuhnya bersifat protektif di dalam, tetapi bersifat protektif parsial pada lintas, subtipe yang berbeda. Berdasarkan sifat antigenisitas dari glikoprotein-glikoprotein tersebut, saat ini virus influenza dikelompokkan ke dalam enambelas subtipe H (H1-H16) dan sembilan N (N1-N9).

Kelompok-kelompok tersebut ditetapkan ketika dilakukan analisis filogenetik terhadap nukleotida dan penetapan urutan (*sequences*) gen-gen HA dan NA melalui cara deduksi asam amino. Cara pemberian nama yang sesuai nomenklatur konvensional untuk isolat virus influenza harus mengesankan tipe virus influenza tersebut, spesies penjamu (tidak perlu disebut kalau berasal dari manusia), lokasi geografis, nomor seri, dan tahun isolasi. Untuk virus influenza tipe A, subtipe hemagglutinin dan neuroamidase-nya ditulis dalam kurung. Salah satu induk strain virus influenza unggas dalam wabah H5N1 garis Asia yang terjadi akhir-akhir ini berhasil diisolasi dari seekor angsa dari provinsi Guangdong, China. Oleh karena itu ia diberi nama A/angsa/Guangdong/1/96 (H5N1). Sedangkan isolat yang berasal dari kasus infeksi H5N1 garis Asia pada manusia yang pertama kali terdokumentasikan terjadi di Hong Kong, dan dengan demikian disebut sebagai

A/HK/156/97 (H5N1).

Hemagglutinin, sebuah protein yang mengalami glikosilasi dan asilasi (*glycosylated and acylated protein*) terdiri dari 562-566 asam amino yang terikat dalam sampul virus. Kepala membran distalnya yang berbentuk bulat, daerah eksternal yang berbentuk seperti tombol dan berkaitan dengan kemampuannya melekat pada reseptor sel, terdiri dari oligosakarida yang menyalurkan derivat asam neuroaminic. Daerah eksternal (*exodomain*) dari glikoprotein transmembran yang kedua, neuroamidase (NA), melakukan aktivitas enzimatis sialolitik (*sialolytic enzymatic activity*) dan melepaskan progeni virus yang terjebak di permukaan sel yang terinfeksi sewaktu dilepaskan. Fungsi ini mencegah tertumpuknya virus dan mungkin juga memudahkan gerakan virus dalam selaput lendir dari jaringan epitel yang menjadi sasaran. Selanjutnya virus pun akan menempel ke sasaran. Ini membuat neuroamidase merupakan sasaran yang menarik bagi obat antivirus. Kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi spesies glikoprotein antagonistik HA dan NA dari *strain* virus tertentu merupakan hal yang penting bagi proses pelekatan dan pelepasan virion.

Pelekatan ke protein permukaan sel dari virion-virion virus influenza A tercapai melalui glikoprotein HA virus tertrimerisasi yang matang (*mature trimerised viral HA glycoprotein*). Stratifikasi pelekatan tersebut didasarkan pada pengenalan spesies asam sialik (N-asetil- atau N-asam glikollineuraminat) ujung akhir yang jelas, tipe hubungan glikosidik ke galaktosa paling ujung ( $\alpha$ 2-3 atau  $\alpha$ 2-6) dan

susunan fragmen yang terletak lebih dalam dari sialil-oligosakarida yang terdapat di permukaan sel. Sebuah varietas dari sialil-oligosakarida yang lain diekspresikan dengan pembatasan (restriksi) ke jaringan dan asal spesies di dalam penjamu lain dari virus influenza. Penyesuaian (adaptasi) glikoprotein HA maupun NA virus ke jenis reseptor yang khas (spesifik) dari spesies penjamu tertentu merupakan prasyarat bagi terjadinya replikasi yang efisien. Ini berarti terjadi perubahan bentuk unit pengikat dari protein HA setelah terjadi penularan antar spesies. Virus influenza unggas biasanya menunjukkan afinitas tinggi terhadap asam sialik yang terkait dengan  $\alpha$ 2-3 karena unsur ini merupakan tipe reseptor yang paling dominan di jaringan epitel endodermik (usus, paru-paru) pada unggas yang menjadi sasaran virus-virus tersebut. Sebaliknya, virus influenza yang beradaptasi pada manusia terutama mencapai residu terkait 2-6 (*2-6 linked residues*) yang mendominasi sel-sel epitel tanpa silia (*non-ciliated*) dalam saluran pernafasan manusia. Sifat-sifat dasar reseptor seperti ini menjelaskan sebagian dari sistem pertahanan suatu spesies, yang membuat penularan influenza unggas ke manusia tidak mudah terjadi. Tetapi akhirnya ini ditemukan ada sejumlah sel epitel berbulu detar (*ciliated cells*) dalam trakhea manusia yang juga memiliki konjugat glikoprotein serupa reseptor unggas dengan densitas yang rendah, dan juga dijumpai adanya sel-sel ayam yang membawa reseptor sialil yang serupa dengan yang ada pada manusia dengan konsentrasi yang rendah. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa manusia tidak sepenuhnya kebal terhadap infeksi virus influenza unggas *strain* tertentu. Pada babi dan juga

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24



burung balam, kedua jenis reseptor tersebut dijumpai dalam densitas yang lebih tinggi yang membuat kedua hewan ini mempunyai potensi untuk menjadi tempat pencampuran bagi *strain* virus unggas dan manusia.

Setelah berhasil melekat pada reseptor yang sesuai, virion masuk dan menyatu ke dalam sebuah ruang endosom melalui mekanisme yang tergantung dan tidak tergantung kepada *clathrin*. Dalam ruang ini virus tersebut mengalami degradasi dengan cara menyatukan membran virus dengan membran endosom: dimediasi oleh pemindahan proton melalui terowongan protein dari matrix-2 (M2) virus, pada nilai pH di endosom sekitar 5,0. Selanjutnya akan terjadi serangkaian penataan ulang protein matrix-1 (M1) dan kompleks glikoprotein homotrimerik HA. Sebagai hasilnya, terbuka (*exposed*) sebuah bidang (*domain*) yang sangat lipofilik dan fusogenik dari setiap monomer HA yang masuk ke dalam membran endolisomal, dan dengan demikian memulai terjadinya fusi antara membran virus dengan membran lisomal. Berikutnya, kedelapan segmen RNA genomik dari virus, yang terbungkus dalam lapisan pelindung dari protein (*ribonucleoprotein complex*, RNP) nukleokapsid (N), dilepaskan ke dalam sitoplasma. Di sini mereka disalurkan ke nukleus untuk melakukan transkripsi mRNA virus dan replikasi RNA genomik melalui proses yang rumit yang secara cermat (*Jw: njlimet*) diatur oleh faktor virus dan faktor sel. Polimerase yang dependen terhadap RNA (RdRp) dibentuk oleh sebuah kompleks (gabungan) dari PB1, PB2 dan protein PA virus, dan memerlukan RNA (RNP) yang terbungkus (*encapsidated RNA (RNPs)*) untuk tugas ini. Setelah

terjadi translasi protein virus dan perangkaian nukleokapsid yang membawa RNA genomik yang sudah ter-replikasi, virion-virion progeni tumbuh dari membran sel yang di dalamnya sudah dimasukkan glikoprotein virus sebelumnya. Penataan antara nukleokapsid berbentuk lonjong dan protein pembungkus virus dimediasi oleh protein matrix-1 virus (M1) yang membentuk struktur serupa cangkang tepat di bawah pembungkus virus. Reproduksi virus di dalam sel yang mudah menerimanya berlangsung cepat (kurang dari sepuluh jam) dan dengan proses yang efisien, asalkan konstelasi gen yang “optimal” tersedia di sana.

Akibat aktivitas RdRp virus yang mudah mengalami kekeliruan, terjadi mutasi dengan kecepatan tinggi, yaitu  $> 5 \times 10^{-5}$  perubahan nukleotida per nukleotida dan juga terjadi percepatan siklus replikasi. Dengan demikian terjadi hampir satu pertukaran nukleotida per genom per replikasi di antara virus-virus influenza. Kalau ada tekanan selektif (misalnya antibodi yang menetralkan, ikatan reseptor yang tidak optimal, atau obat antiviral) yang bekerja selama proses replikasi virus dalam penjamu atau dalam populasi, dapat terjadi ada mutan-mutan dengan keunggulan selektif (mis. lepas dari proses netralisasi, membentuk unit pengikat reseptor baru) dan kemudian menjadi varian yang dominan dalam *quasi*-spesies virus di dalam tubuh penjamu atau dalam populasi.

Jika determinan antigenik dari glikoprotein HA dan NA membran dipengaruhi oleh mekanisme yang dipicu kekebalan, proses (gradual) tersebut disebut sebagai *antigenic drift*. Sebaliknya, *antigenic shift* menunjukkan adanya

perubahan mendadak dan mendalam dalam determinan antigenik, yaitu pertukaran subtipe H dan/atau N, di dalam satu siklus tunggal replikasi. Hal ini terjadi dalam sebuah sel yang secara bersamaan terinfeksi oleh dua atau lebih virus influenza A dari subtipe yang berbeda. Karena distribusi segmen genomik virus yang sudah ter-replikasi ke dalam progeni yang baru tumbuh berlangsung tanpa tergantung kepada subtipe asal dari tiap segmen itu, dapat muncul progeni yang berkemampuan untuk bereplikasi yang membawa informasi genetik dari virus induk yang berbeda-beda (disebut sebagai *reassortants*). Sementara virus penyebab wabah influenza pada manusia yang terjadi di tahun 1957 (H2N2) dan 1968 (H3N2) secara jelas muncul dari percampuran (*reassortment*) antara virus manusia dan virus unggas, virus penyebab "Flu Spanyol" di tahun 1918 semata-mata berasal dari unggas.

## **E. Hal-Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Flu Burung**

### **1. Penularan antara sesama unggas**

Lingkar hidup virus influenza unggas jenis patogenisitas rendah dalam unggas air liar secara genetik adalah stabil. Siklus infeksi antar unggas terjadi melalui rantai oral-fekal (mulut-tinja). Selain menular melalui kontak langsung dari penjamu ke penjamu, air dan benda-benda lain yang tercemar virus merupakan jalur penularan tidak langsung yang juga penting. Ini berbeda dengan penularan virus influenza pada mamalia (manusia, babi, kuda) yang terutama terjadi melalui percikan yang tersembur dari hidung dan mulut. Pada unggas, titer ekskresi tertinggi yang

pernah dilaporkan mencapai  $108,7 \times 50\%$  dosis telur-terinfeksi (*egginfected dose*, EID50) per gram tinja. Titer rata-rata biasanya jauh lebih rendah dari itu. Virus influenza unggas menunjukkan kemampuan yang mengagumkan dalam mempertahankan daya penularannya di lingkungan alam, terutama di permukaan air, meskipun dalam morfologi nampak rapuh. Telah dibuktikan bahwa suspensi virus dalam air mampu mempertahankan daya penularannya selama lebih dari 100 hari pada suhu  $17^{\circ}\text{C}$ . Di bawah  $-50^{\circ}\text{C}$  virus dapat bertahan praktis untuk waktu yang tidak terbatas. Data membuktikan bahwa di daerah palearktik, virus influenza unggas terawetkan di dalam air danau yang beku selama musim dingin ketika penjamu alaminya sedang bermigrasi ke tempat yang lebih panas. Ketika mereka kembali pada musim panas berikutnya, unggas-unggas tersebut beserta anak-anaknya yang masih rentan akan terinfeksi oleh virus-virus yang terlepas sewaktu es mencair. Sejalan dengan temuan ini, diperkirakan bahwa virus-virus influenza tersimpan awet dalam lingkungan es untuk waktu yang sangat lama, dan bahwa virus-virus kuno serta genotipnya dapat aktif kembali dari tempat-tempat penampungan semacam itu.<sup>12</sup>

Masuknya virus LPAI sub tipe H5 atau H7 ke tubuh kawanan unggas yang rentan merupakan dasar dari rantai infeksi yang dapat diikuti dengan perkembangan *de novo* biotipe yang sangat patogenik. Risiko penularan dari burung liar ke unggas

---

<sup>12</sup>Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, *Pemerintah Harus Tetapkan Prioritas Penanggulangan Flu Burung*, Monday, July 03 2006.

peliharaan terutama terjadi kalau unggas peliharaan tersebut dibiarkan bebas berkeliaran, menggunakan air yang juga digunakan oleh burung liar, atau makan dan minum dari sumber yang tercemar kotoran burung liar pembawa virus. Unggas juga dapat terinfeksi jika bersentuhan langsung dengan hewan pembawa virus, atau kotoran hewan lain yang membawa virus, atau bersentuhan dengan benda-benda yang terveimar bahan mengandung virus. Sekali virus menginfeksi kawanan unggas, LPAIV tidak harus mengalami suatu fase adaptasi pada spesies unggas tersebut sebelum dikeluarkan lagi dalam jumlah yang cukup besar untuk dapat menular secara horisontal ke unggas lain, baik dalam kawanan sendiri ataupun ke kawanan yang lain. Demikian pula sekali HPAIV berkembang dari kawanan unggas yang terinfeksi LPAIV, ia juga dapat menular dengan cara yang sama. Pasar unggas yang menjual unggas dalam jumlah besar dan unggas ditempatkan secara saling berdesakan, merupakan multiplikator penyebaran penularan.

Tindakan pengamanan (*biosecurity*) yang baik, yang ditujukan untuk mengisolasi perusahaan peternakan unggas yang besar, dapat secara efektif mencegah penularan dari satu peternakan ke peternakan yang lain secara mekanik (misalnya melalui alat-alat, kendaraan, makanan, pakaian -- terutama sepatu, dan kandang atau kurungan yang tercemar). Sebuah analisis yang dilakukan terhadap kasus wabah HPAI di Italia selama tahun 1999/2000 menunjukkan cara penulatan sebagai berikut: pemindahan atau perpindahan kawanan unggas (1.0%), kontak yang terjadi selama dalam pengangkutan unggas ke tempat pemotongan (8.5%).

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

lingkungan dalam radius satu kilometer seputar peternakan yang terserang (26,2%), truk-truk yang digunakan mengangkut pakan, kandang atau bangkai unggas (21,3%), penularan secara tidak langsung karena pertukaran karyawan, alat-alat, dsb (9,4%). Tidak ada petunjuk bahwa wabah yang terjadi di Italia itu juga menyebar melalui udara. Tetapi pada wabah yang terjadi di Belanda (2003) dan Kanada (2004), diperkirakan juga terjadi penyebaran melalui udara (Landman and Schrier 2004, Lees 2004). Peranan vektor hidup seperti binatang pengerat atau lalat, yang dapat bertindak sebagai “vektor mekanik” tetapi dia sendiri tidak terinfeksi, belum dapat ditentukan tetapi yang pasti peranan mereka tidak dianggap besar.

Hingga munculnya HPAIV H5N1 garis Asia, adanya infeksi balik HPAIV dari unggas ternak ke burung liar belum memegang peranan yang berarti. Tetapi dalam bulan April 2005, penyakit yang diakibatkan oleh H5N1 garis Asia muncul di danau Qinghai di Barat Laut China yang memakan korban ribuan angsa berkepala bergaris dan bebek spesies lain yang berpindah serta juga burung camar. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya penularan virus H5N1 garis Asia oleh burung-burung liar perlu diperhitungkan dalam konsep pencegahan di masa datang (dibahas di bawah).

Sejak akhir 2003, di Asia telah dijumpai beberapa virus H5N1 yang sangat patogen pada ayam tetapi tidak pada bebek. Uji coba infeksi dengan menggunakan isolat virus-virus ini menunjukkan campuran yang heterogen dalam analisis genetik dan kemampuan membentuk lempeng dalam biakan sel. Bebek-bebek yang selamat

dalam percobaan dengan isolat ini mengeluarkan virus pada hari ke 17 yang telah kehilangan potensi patogenitasnya terhadap bebek. Jika gejala-gejala klinis digunakan untuk melakukan skrining adanya HPAIV H5N1 di lapangan, bebek-bebek ini nampaknya telah menjadi “Kuda Troya” bagi virus-virus ini (Webster 2006).

## 2. Penularan ke manusia

Penularan virus influenza unggas ke manusia yang menimbulkan gejala-gejala klinis yang nyata masih dianggap peristiwa yang jarang. Mengingat besarnya potensi terpapar HPAIV H5N1 pada jutaan manusia di Asia Tenggara, jumlah kasus influenza unggas pada manusia yang terdokumentasikan, meskipun menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir ini, secara komparatif masih dapat dianggap rendah.<sup>13</sup>

Pertama kali ditemukan adanya hubungan antara HPAIV H5N1 garis Asia dengan penyakit pernafasan pada manusia adalah di Hong Kong pada tahun 1997, ketika enam dari 13 orang yang terinfeksi H5N1 meninggal dunia. Kasus-kasus ini secara epidemiologik berhubungan dengan kejadian wabah H5N1 yang sangat patogen di pasar unggas hidup. Risiko penularan langsung dari unggas ke manusia terutama terjadi pada mereka yang telah bersentuhan dengan unggas ternak yang

---

<sup>13</sup>[http://www.who.int/diseases/avian\\_influenza/country/en](http://www.who.int/diseases/avian_influenza/country/en).

sudah terinfeksi, atau dengan permukaan benda-benda yang banyak tercemari kotoran unggas. Risiko terpapar diperkirakan cukup substantif sewaktu penyembelihan, pencabutan bulu, pemotongan dan persiapan unggas untuk dimasak. Virus HPAI H5N1 garis asia dapat ditemukan di semua jaringan termasuk daging di tubuh bangkai. Dalam beberapa kejadian serupa, dilaporkan bahwa orang yang menyembelih atau mempersiapkan unggas yang sakit untuk dimakan telah mengalami penyakit yang fatal, sementara anggota keluarganya yang juga ikut makan daging unggas tersebut tidak mengalami hal serupa.

Suatu *strain* H9N2 telah menyebabkan gejala mirip influenza ringan pada dua orang anak dalam kejadian SAR di Hong Kong di tahun 1999, dan seorang anak lagi di pertengahan bulan Desember 2003. Strain H9N2 yang beredar dalam unggas ternak pada saat ini telah menimbulkan gejala-gejala dan angka kematian yang bermakna pada spesies yang rentan semisal kalkun dan ayam.

Sampai hari ini, tidak ada bukti bahwa daging unggas yang dimasak secara baik dapat menjadi sumber penularan H5N1 garis Asia pada manusia. Sebagai pedoman umum, WHO menganjurkan agar daging dimasak sampai matang benar, sehingga seluruh bagian daging mencapai suhu internal 70o C. Pada suhu ini virus influenza dapat dimatikan sehingga membuat aman untuk dimakan meskipun daging mentahnya telah tercemari virus H5N1.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Redaksi, *WHO Adakan Pelatihan Penanggulangan Flu Burung di RSUD Kabanjahe*. Thursday, 01 June 2006 Kabanjahe (SIB).



### 3. Penularan ke mamalia lain

Dalam beberapa kejadian, virus influenza unggas sudah menular ke berbagai spesies mamalia. Di sini, mengikuti siklus replikasi dan adaptasi, garis epidemi baru dapat diketahui. Terutama babi telah sering terlibat dalam “pelintasan antar kelas” semacam itu. Di populasi babi di Eropa, virus H1N1 yang serupa virus unggas sangat banyak dijumpai dan sebuah virus H1N2, yang merupakan virus re-assortant unggas-manusia, pertama kali berhasil diisolasi di Inggris tahun 1992, kini makin mantap pertumbuhannya. Di Amerika Serikat, sebuah virus (H3N2) yang merupakan *triple reassortant* antara H1N1 yang klasik, virus H3N2 manusia dan subtipe virus unggas kini mulai beredar. Subtipe lain yang barangkali berasal dari unggas (mis. H1N7, H4N6) beberapa kali dijumpai pada babi. Sebuah virus H9N2 yang berasal dari unggas dalam prevalensi yang moderat dijumpai pada babi di China bagian timur. Selain babi, mamalia laut dan kuda juga sudah menunjukkan tertulari virus influenza A yang berasal dari unggas.

Infeksi H5N1 secara alami juga pernah dijumpai pada harimau dan kucing besar lainnya di sebuah kebun binatang di Thailand setelah hewan-hewan itu diberi makan bangkai ayam yang membawa virus (. Hewan-hewan tersebut kemudian menderita sakit berat dengan angka kematian yang tinggi. Nampaknya terjadi juga penularan dari kucing ke kucing di kebun binatang tersebut. Kasus-kasus ini merupakan laporan pertama tentang terjadinya infeksi virus influenza pada golongan *Felidae*. Dalam suatu eksperimen, kucing rumah Eropa berbulu pendek juga dapat

ditulari virus H5N1. Pada tahun 2004, sebanyak 3.000 sampel serum yang diambil dari babi yang bebas berkeliaran di Vietnam telah diuji secara serologik untuk mengetahui seberapa jauh mereka telah terpapar oleh virus influenza H5N1.

Melalui uji netralisasi virus dan analisis *Western blot* terbukti bahwa 0,25% sampel menunjukkan hasil seropositif. Dalam suatu eksperimen infeksi, nampak bahwa babi dapat terinfeksi virus H5N1 yang diisolasi di Asia di tahun 2004 dari manusia dan unggas. Gejala yang muncul setelah diobservasi selama empat hari pasca infeksi hanyalah batuk ringan dan suhu badan yang sedikit meningkat. Selanjutnya virus dapat diisolasi dari jaringan saluran pernafasan selama oaling sedikit enam hari. Titer virus tertinggi dari usap jaringan hidung dijumpai pada hari kedua pasca infeksi, tetapi tidak satupun dari hewan yang diinfeksi melalui percobaan ini yang menularkannya ke babi lain yang bersentuhan dengan mereka. Nampaknya virus H5N1 ganas yang beredar di Asia dapat secara alami menginfeksi babi tetapi insidensi penularan seperti itu agaknya masih rendah. Tidak satupun virus H5N1 dari unggas dan manusia dalam uji coba tersebut sanggup menular di antara babi-babi dalam kondisi eksperimental ini. Berdasarkan pada pengamatan ini, saat ini agaknya babi tidak memainkan peranan penting terhadap terjadinya wabah virus H5N1 garis Asia. Wabah influenza unggas H7N7 yang sangat patogen pada unggas ternak di Belanda, Belgia dan Jerman dalam musim semi tahun 2003 telah menyebabkan penyakit yang ringan, terutama konjunktivitis, pada 89 pekerja peternakan unggas yang terpapar oleh unggas hidup dan bangkai unggas yang

terinfeksi. Tetapi seorang dokter hewan yang terkena infeksi mengalami sesak nafas akut yang membawa kematian. Selain itu, selama terjadi wabah di Belanda, infeksi H7N7 telah secara virologi dan serologi terpastikan pada beberapa keluarga yang mengalami kontak dengan sumber infeksi, empat di antaranya mengalami konjunktivitis (Du Ry van Beest Holle 2005). Bukti adanya infeksi alami (asimtomatik) oleh *strain* LPAIV subtype H9, H7 dan H5 pada manusia juga telah dilaporkan pada kejadian lain di Italia dan Jepang.

Dalam sebuah laporan singkat, disampaikan sebuah kejadian infeksi mematikan oleh influenza H5N1 pada tiga ekor musang pemakan ikan yang lahir di tempat pemeliharaan di sebuah taman nasional Vietnam. Sumber penularan sampai saat ini belum diketahui dengan jelas. Sementara 20 ekor hewan sejenis yang tinggal di kandang sebelahnya tidak ada satupun yang sakit.

Virus influenza unggas tidak ditemukan pada tikus, kelinci dan beberapa jenis hewan lain yang ada di pasar unggas hidup di Hong Kong, ketika sebanyak 20% ayam yang dijual di sana ditemukan positif terinfeksi H5N1 garis asia.

### BAB III

## BIRO BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

### A. Tinjauan Umum Tentang Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Biro Bina Sosial Setdapropsu sebagai suatu biro di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara maka ia berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatera Utara di Medan, dalam hal pengurusan urusan di bidang sosial.

Sebagai suatu biro maka keberadaan Biro Bina Sosial Setdapropsu tidak terlepas dari tugas-tugas kesekretariatan yang diemban oleh biro-biro lainnya di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Utara. Pada kenyataannya tugas Biro Bina Sosial Setdapropsu adalah memberikan masukan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pemasukan informasi dan juga sebagai pelaksana keputusan dalam tugas-tugas sosial yang diembannya.

Efektivitas tugas tersebut dilaporkan kepada Gubernur dan selanjutnya dievaluasi. Dengan adanya Biro Bina Sosial Setdapropsu maka fungsi kedudukan Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya dapat dilakukan khususnya dalam masalah-masalah sosial. Kondisi ini menggambarkan kepada kita bahwa tugas-tugas pemerintahan tidak dapat dijalankan semata-mata oleh pimpinan secara sendiri tetapi ia membutuhkan lembaga agar tugasnya tersebut dapat lebih efektif dan mencapai

sasaran secara tepat guna.

## **B. Tugas, Fungsi dan Kedudukan**

Sedangkan perihal tugas dan fungsi Biro Bina Sosial Setdapropsu sebagai salah satu biro yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah didasarkan kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061.1 – 855.K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara dimana dalam Pasal 2 nya diterangkan bahwa Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, organisasi dan Ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah propinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah propinsi,
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
3. Pengelolaan sumber daya aparatur keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah propinsi,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya,
5. Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan

fungsinya,

6. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan.

Sebagai salah satu biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu di Medan.

### C. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas

Perihal tugas dan fungsi Biro Bina Sosial Setdapropsu sebagai salah satu biro yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah didasarkan kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061.1 –855.K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara dimana dalam Pasal 2 nya diterangkan bahwa Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasu, organisasi dan Ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah propinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

7. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah propinsi,
8. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

9. Pengelolaan sumber daya aparatur keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah propinsi.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
11. Pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
12. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam suatu organisasi, struktur organisasi merupakan hal yang penting yang tidak boleh terlepas dari organisasi itu, karena organisasi itu adalah kumpulan dari orang-orang yang ada dalam suatu kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan.

Adanya organisasi maka akan terlihat bagaimana pembagian kerja, hubungan kerja, lalu lintas wewenang (authority) dan tanggungjawab (responsibility) antara atasan dengan bawahan dan antara bagian-bagian dalam organisasi.

Struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dan wewenang (authority) serta tanggungjawab (responsibility) yang berhubungan satu sama lain antara departemen dengan departemen lain dan orang-orang dalam departemen di suatu organisasi.

Pada Biro Bina Sosial Setdapropsu yang diterapkan adalah struktur organisasi berbentuk garis dan fungsional.

Untuk lebih mengetahui struktur organisasi dan uraian tugas dari masing-masing bagian di Biro Bina Sosial Setdapropsu dapat diuraikan sebagai berikut :

Kepala Biro Bina Sosial mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan pembinaan kehidupan beragama, pembinaan pendidikan dan kesehatan, serta pembinaan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada di atas, Kepala Biro Bina Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar pembinaan kehidupan beragama, pembinaan pendidikan dan kesehatan serta pembinaan sosial.
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan kehidupan Beragama, pembinaan pendidikan dan kesehatan dan pembinaan sosial, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- c. Penyelenggaraan proses pemberian bantuan, pembinaan kehidupan Beragama, pendidikan, kesehatan dan sosial, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Pembinaan Hukum dan Sosial, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- e. Pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Pembinaan



Hukum dan Sosial, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- f. Pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pembinaan Hukum dan Sosial, sesuai Standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Biro Bina Sosial dibantu oleh :

- a. Kepala Bagian Pembinaan dan Kehidupan Beragama;
- b. Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Kepala Bagian Pembinaan Sosial.

Kepala Bagian Pembinaan dan Kehidupan Beragama mempunyai tugas membantu Kepala Biro Bina Sosial dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kerukunan beragama, menyelenggarakan bantuan dan kegiatan keagamaan, penyelenggaraan urusan Haji dan penyelenggaraan urusan Haji dan penyelenggaraan urusan ketata-usahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar pengkajian, evaluasi dan pembinaan kerukunan beragama, penyelenggaraan pemberian bantuan dan kegiatan keagamaan dan penyelenggaraan urusan Haji.
- b. Pelaksanaan koordinasi, pengkajian dan evaluasi perkembangan kerukunan

beragama, kegiatan keagamaan dan penyelenggaraan urusan haji, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan kerukunan beragama, pembinaan kegiatan keagamaan dan penyelenggaraan urusan haji, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Sosial, sesuai bidang tugas fungsinya.
- e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Biro Bina Sosial, sesuai bidang tugas fungsinya.
- f. Pelaporan dan pertanggung-jawaban kepada Kepala Biro Bina Sosial, sesuai Standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana maksud di atas, Kepala Pembinaan Kehidupan beragama dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Bina Kerukunan Beragama;
- b. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Kegiatan Keagamaan;
- c. Kepala Sub Bagian Urusan Haji
- d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Kepala Sub Bagian Bina Kerukunan Beragama, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan, dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar pembinaan kerukunan beragama.

- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data tentang keberadaan setiap umat masing-masing Agama dan hubungan umat yang berbeda Agama, masalah-masalah yang dapat menimbulkan kerawanan dan/atau yang dapat mempererat hubungan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan pembinaan hubungan antar umat beragama, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai bidang tugasnya.
- e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai Standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Bantuan dan Kegiatan Beragama, sesuai Standar yang ditetapkan.

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan keagamaan, rumah/tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta Standar permohonan dan penyaluran bantuan.
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan/data tentang Lembaga-

lembaga keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan, jumlah dan keadaan rumah-rumah/tempat peribadatan, kegiatan-kegiatan ibadah masing-masing agama dan kegiatan keagamaan lainnya, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/bahan untuk penyaluran bantuan dan pembinaan kegiatan keagamaan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai bidang tugasnya.
- e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai Standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Urusan Haji, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar penyelenggaraan urusan Haji.
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan/data untuk melaksanakan koordinasi, evaluasi dan peningkatan penyelenggaraan urusan haji, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai bidang tugasnya.

d. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai Standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan Ketata-usahaan Biro.
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi dalam pelaksanaan tugas Kepala Biro.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Sosial dan Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai bidang tugasnya.
- d. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Biro Bina Sosial dan Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Biro Bina Sosial melalui Kepala Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama, sesuai Standar yang ditetapkan.

Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, mempunyai tugas membantu Kepala Biro Bina Sosial dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pendidikan, kesehatan dan Olah Raga, Tenaga Kerja dan Kepemudaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkaji bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan, Kesehatan, Olah Raga, Tenaga Kerja dan Kepemudaan.
- b. Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan evaluasi pertambangan, Kesehatan, Olah

Raga, pendidikan, tenaga kerja dan pemuda, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

- c. Penyiapan pelaksanaan penyaluran bantuan pembinaan kesehatan, Olah raga, pendidikan, tenaga kerja dan Pemuda, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Sosial, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Biro Bina Sosial, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- f. Pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Biro Bina Sosial, sesuai Standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana maksud di atas, Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Olah Raga;
- b. Kepala Sub Bagian Pendidikan;
- c. Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja dan Pemuda.

Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Olah Raga, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar kerjasama, pembinaan pengembangan Kesehatan dan Olah Raga.
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan/data tentang pembinaan dan

pengembangan kesehatan dan olahraga, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/bahan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran bantuan kesehatan dan olah raga, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, sesuai bidang tugasnya.
- e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, sesuai Standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Pendidikan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar kerjasama, pembinaan pengembangan dan peningkatan pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan/data tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/bahan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran bantuan pendidikan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pendidikan dan

Kesehatan, sesuai bidang tugasnya.

- e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, sesuai Standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja dan Pemuda, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar kerjasama, pembinaan pengembangan, perlindungan dan pembinaan SDM Tenaga Kerja serta pembinaan pengembangan dan pemberdayaan kreatifitas Pemuda.
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan/data tentang kondisi Tenaga Kerja dan Pemuda, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/bahan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran bantuan tenaga kerja dan Pemuda, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, sesuai bidang tugasnya.
- e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Kesehatan, sesuai Standar yang ditetapkan.



Kepala Bagian Pembinaan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Biro Bina Sosial dalam mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan anak, pembinaan kesejahteraan masyarakat, serta penyelenggaraan bantuan dan rehabilitasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Pembinaan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan bantuan perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan rehabilitasi sosial.
- b. Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan evaluasi perkembangan perlindungan anak, kesejahteraan masyarakat dan rehabilitasi sosial, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi perlindungan anak, pembinaan kesejahteraan masyarakat dan penyaluran bantuan rehabilitasi sosial, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Bina Sosial, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Biro Bina Sosial, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- f. Pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Biro Bina Sosial, sesuai Standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Pembinaan Sosial dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak;
- b. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.

Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar pembinaan dan perlindungan anak.
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan/data tentang anak-anak yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/bahan untuk melaksanakan koordinasi pembinaan dan perlindungan Anak serta penyaluran bantuan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan Sosial, sesuai bidang tugasnya.
- e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Pembinaan Sosial, sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pembinaan Sosial, sesuai Standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sistim jaminan sosial.
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan/data tentang kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta penyaluran bantuan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/bahan untuk melaksanakan koordinasi pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyaluran bantuan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan Sosial, sesuai bidang tugasnya.
- e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Pembinaan Sosial, sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pembinaan Sosial, sesuai Standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi sosial pengelolaan panti-panti rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat yang telah dibina panti-panti sosial dan peran serta masyarakat.
- b. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan/data tentang penyelenggaraan

kegiatan rehabilitasi sosial dan panti-panti rehabilitasi sosial serta penyaluran bantuan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/bahan untuk melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial serta penyaluran bantuan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan Sosial, sesuai bidang tugasnya.
- e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bagian Pembinaan Sosial, sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pembinaan Sosial, sesuai Standar yang ditetapkan.

#### **D. Kedudukan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Menghadapi Efidemi Flu Burung**

Sebagaimana diterangkan dalam sub bab sebelumnya bahwa Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di ibukota Propinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan. Dengan kedudukan tersebut maka wilayah kerja dari Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah meliputi seluruh wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Sebagai suatu Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara bertugas

melakukan fungsi dan tugas kepala daerah Propinsi Sumatera Utara melalui pendelegasian tugas dan wewenang di bidang sosial termasuk halnya di bidang kesehatan.

Sebagai akibat keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, khususnya pada Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas komite FBPI, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota Pengendalian flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.
- (2) Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur untuk Komite Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Komite Kabupaten/Kota.
- (3) Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (avian influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi dan pedoman serta arahan yang ditetapkan oleh Komnas FBPI.
- (4) Komite Provinsi dan Komite Kabupaten/Kota melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komnas FBPI.

Dalam pembentukan Komite Provinsi Pengendalian Flu Burung dan kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza, maka salah satu anggota komite tersebut adalah Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, selain itu ada juga instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Upaya instansi terkait khususnya Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan penyebaran flu burung adalah berupa penyuluhan dengan menerbitkan brosur dan penyuluhan secara langsung tentang bagaimana penularan virus flu burung serta gejala-gejala pada manusia yang terjangkit flu burung.
2. Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi di Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit bahaya flu burung adalah kekurangan sinkronan dari hal-hal yang dikoordinasikan sehingga sering terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan pelaksanaan pembebanan tanggung jawab secara sepihak.
3. Koordinasi yang dilakukan dalam penanganan virus flu burung adalah lintas sektoral antar Biro dan antar dinas di bawah naungan Komite Nasional Pengendalian Flu Burung untuk tingkat pusat dan Komite Daerah untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi-instansi yang terlibat dalam koordinasi sektoral tersebut adalah Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, TNI/Polri dan instansi lainnya.

4. Keterkaitan Hukum Administrasi Negara tugas Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai anggota dari Tim Koordinasi Daerah Pengendalian Flu Burung adalah sebagai perpanjangan tangan Gubernur Kepala Daerah dan dengan sebab tersebut maka Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki pelaporan tugas kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

## B. Saran

1. Kepada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara hendaknya dapat mensosialisasikan secara maksimal tentang epidemi flu burung sehingga masyarakat luas dapat melakukan pencegahan secara maksimal pula.
2. Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan sehubungan dengan pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan flu burung hendaknya masing-masing instansi tersebut menyadari bahwa kepentingan masyarakat luas adalah persoalan utama yang harus lebih dahulu diselesaikan khususnya dalam permasalahan penanganan virus flu burung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta, 2004.
- Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, *Pemerintah Harus Tetapkan Prioritas Penanggulangan Flu Burung*, Monday, July 03 2006.  
[http://www.who.int/diseases/avian\\_influenza/country/en](http://www.who.int/diseases/avian_influenza/country/en).
- Indrawan WS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2002.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 2000.
- Kartono Muhammad, *Flu Burung*, Adafted From [www.influenzaReport.com](http://www.influenzaReport.com) by Sebastian Kamps, Christian Hofmann, and Wolfgang Preiser.
- Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- RA, Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Redaksi, *WHO Adakan Pelatihan Penanggulangan Flu Burung di RSU Kabanjahe*, Thursday, 01 June 2006 Kabanjahe (SIB).
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Suku Dinas Pelayanan Kesehatan, Kotamadya Jakarta Utara, *Gejala dan Strategi Flu Burung*, 22/09/2005.